KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Dampak dolar tinggi, harga obat impor berpotensi naik
Tanggal : Jumat, 12 Juni 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Dampak Dolar Tinggi

Harga Obat Impor Berpotensi Naik

SENAYAN mengingatkan potensi kenaikan harga obat-obatan akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Pasalnya, hampir 80 besar bahan baku obat berasal dari luar negeri.

Anggota Komisi IX DPR Vita Ervina mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan ketahanan farmasi nasional masih menghadapi tantangan besar akibat tingginya ketergantungan terhadap impor bahan baku obat. Persoalan ini tidak semata-mata terkait fluktuasi nilai tukar, tapi menunjukkan belum kuatnya fondasi kemandirian industri farmasi nasional.

"Selama sebagian besar bahan baku obat masih impor, industri farmasi Indonesia akan terus rentan terhadap tekanan ekonomi global yang berdampak pada masyarakat," jelas Vita di Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, potensi kenaikan harga obat perlu diantisipasi secara serius karena dapat menambah beban masyarakat di tengah berbagai tekanan ekonomi. Karena itu, akses terhadap obat yang aman, bermutu, dan terjangkau merupakan bagian dari hak dasar masyarakat yang harus dijamin negara.

Vita mendorong Pemerintah mengambil langkah diversifikasi pemasok bahan baku dan mempercepat pembangunan industri bahan baku farmasi dalam negeri. Langkah itu perlu didukung melalui penguatan riset dan inovasi, insentif investasi, serta peningkatan kapasitas produksi nasional.

"Juga kolaborasi yang lebih kuat antara Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) farmasi, perguruan tinggi, dan sektor industri," usul politikus PDIP ini.

Komisi IX DPR, kata Vita, akan terus mendorong Pemerintah untuk menghadirkan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas harga obat demi terwujudnya kemandirian farmasi nasional. Karena ini sebagai bagian dari ketahanan kesehatan bangsa. "Jangan sampai setiap pelemahan rupiah selalu berujung pada meningkatnya beban kesehatan masyarakat," tandasnya.

Menurutnya, negara harus mempercepat kemandirian farmasi nasional agar akses terhadap obat yang aman, bermutu, dan terjangkau tetap terjamin. "Kesehatan rakyat tidak boleh menjadi korban ketergantungan kita terhadap impor bahan baku obat," tegas Vita.


FOTO: FB PRIBADI
Vita Ervina

Selain itu, Pemerintah perlu memastikan kondisi pelemahan rupiah tidak mengganggu ketersediaan dan keterjangkauan obat dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Utamanya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjadi tumpuan jutaan rakyat Indonesia.

Obat, beber dia, bukan sekadar komoditas ekonomi, tapi kebutuhan dasar yang menyangkut keselamatan dan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, negara tidak boleh membiarkan rakyat menanggung beban berlipat setiap kali terjadi gejolak nilai tukar.

Momentum ini, harap dia, harus menjadi peringatan dan dorongan bagi Pemerintah untuk mempercepat kemandirian farmasi nasional, memperkuat produksi bahan baku dalam negeri, dan memastikan harga obat tetap terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. "Kesehatan adalah hak konstitusional warga negara yang wajib dilindungi, bukan diserahkan pada ketidakpastian pasar global," tegasnya.

Senada, anggota Komisi VI DPR Nasim Khan mendorong Pemerintah mempercepat hilirisasi industri obat berbahan baku lokal demi memangkas ketergantungan impor farmasi. Apalagi saat ini harga-harga obat dipasaran mulai melonjak seiring melemahnya nilai tukar rupiah.

"Ketergantungan bahan baku obat dari produk impor memicu kerapuhan ketahanan kesehatan nasional," ujar Nasim di Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Sebagai solusinya, Nasim mendesak optimalisasi Obat Bahan Alam (OBA) dengan memanfaatkan kekayaan hayati Indonesia. Pemanfaatan tanaman obat lokal bukan sekadar alternatif, tapi strategi mutlak untuk menstabilkan harga obat di pasar domestik serta menggerakkan ekonomi sektor pertanian herbal.

Dia menyebut, saat ini bahan baku obat 80 persen berasal dari impor. Ketika rupiah melemah, bahan baku obat tentunya berdampak sehingga harga obat menjadi mahal. Padahal Indonesia memiliki warisan kekayaan alam dan budaya pengobatan tradisional yang luar biasa.

Indonesia, tambah dia, memiliki berbagai jenis tanaman obat dan bahan alami yang berpotensi dikembangkan menjadi OBA yang aman, berkhasiat, dan bermutu. "Ini bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat kemandirian bangsa," tandas politikus PKB ini.

Ketergantungan masif pada pasokan global, kata dia, sangat merugikan masyarakat kecil yang membutuhkan akses pengobatan terjangkau. Karena itu, Pemerintah dituntut menetapkan target konkret pengurangan impor tahunan dan memperkuat ekosistem farmasi dalam negeri. Caranya mulai dari teknologi, bahan kemasan, hingga mesin produksi.

Masyarakat yang membutuhkan pengobatan tentunya sangat terdampak ketika harga obat menjadi semakin mahal. Dengan itu, Pemerintah harus memiliki target untuk menurunkan ketergantungan bahan baku impor. "Jangan sampai ketahanan kesehatan nasional kita bergantung pada kondisi negara lain," ujar Nasim.

Dia menilai, akan ada perubahan signifikan pada harga dan stok obat jika Pemerintah berhasil melakukan hilirisasi bahan obat berbasis lokal. Harga obat akan lebih stabil, pasokan lebih terjamin, dan manfaat ekonominya bisa dirasakan masyarakat. "Petani tanaman obat, pelaku UMKM herbal, hingga industri farmasi nasional juga akan ikut tumbuh," imbuh politikus asal Jawa Timur (Jatim) ini. ■ TIF